

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, BN dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Cet, I. Alumni, Bandung.
- Bey, Fachri, 2009, *Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamil, MN, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet, II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arief, 1986, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Cet, III, Rajawali, Jakarta.
- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Cet. I, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Gultom, Elfrida, 2000, *Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum*. Universitas Mpu Tantular, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet, II, Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Cet. I, Alumni, Bandung.
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet, I, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Joni, Mohammad, 2012, *Penjara (bukan) Tempat Anak*. Cet. I, Peran Indonesia, Jakarta.
- Kanter E.Y Dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Keputusan Bersama Ketua MARI, Kejaksaan RI, Kapol RI, Menkum Ham RI, Men Sos RI, Dan Menteri P3A RI, No: 166.A/ KMA/ SKB/XII/2009, No:148A/ A/ JA/ 127 2009, No: B/ 45/ XII/ 2009, No:M.HH-08HM.03.02/2009, No:10/ PRS-2/ KPTS/ 2009, No: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VI11/2010 tanggal 14 Februari 2011 tentang Usia Pelaku Anak Yang Dapat Diproses Dipersidangan Minimal Berumur 12 (dua betas) tahun.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak, LNRI No. 57 Tahun 1990.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01. PK.04.10 Tahun 1989 tentang Tugas, Kewajiban Dan Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02. PW.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Tertib Ruang Sidang.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham Nomor: L23.PR.09.03 Tahun 2003, tentang Penyusunan RUU Perubahan UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Badan Reserse Dan Kriminal, 2010.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung.

Marwan, M, dan Jimmy P. 2009, *Dictionary Of Law Complete Edition*. Cet. I, Realty Publisher, Surabaya.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nusantara, 1986, *Abdul Hakim Garuda. Hukum Dan Hak-Hak Anak Anak*, Rajawali, Jakarta.

Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA).

Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Tugas-Tugas Polri.

Peraturan KAPOLRI No Pol: B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya No. 45/113. Tanggal 14 Desember 1990.

Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Peradilan Bag/ Remaja/ Beijing Rules No. 40/33. Tanggal 29 November 1985.

Peraturan Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Tindak Pidana Remaja/ The Riyadh Guidelines No. 45/112. Tanggal 14 Desember 1990.

Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Cet, II, Refika Aditama, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung

Rofiq, Ahmad, 2001, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salamah, YY, 2010, *Mediasi Dalam Proses Di Pengadilan*. Cet, I, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cet, I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satriya, Barnbang, 2010, *Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Cet, I, Alfabeta, Bandung.

Setyawati, Melly dan Supriyadi WE, 2007, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Cet, I, Elsam, Jakarta.

- Sirait, AM, 2011, *Menjaga Dan Melindungi Anak*, Divisi Pengaduan & Pemantauan Anak, Jakarta.
- Soedarto, 1979, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*. Cet, I, Binacipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekito, SWW, 1989, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- Soerodibroto, R.S. 2006, *KUHP Dan KUHPA. Ed. Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetodjo, Wagiarti, 2010, *Hukum Pidana Anak*. Cet. Ill, Aditama, Bandung.
- Sofian, Ahmad, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Cet. I, Sof Media, Medan.
- Soefyanto, 2008, *Perlindungan Anak Dalam Pengadilan Anak*. Cet. I, Universitas Islam Jakarta, Jakarta.
- Sumitro, IS, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhariyono, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*. Cet. I, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/ 1959 tanggal 15 Februari 1959 tentang pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan pintu tertutup.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: M.A/ Pern/ 048/ 1971 tanggal 4 Januari 1971 tentang Peradilan Anak Dalam Pemeriksaan, Putusan Wajib Memberikan jaminan Kesejahteraan Dan Keadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 Nomor: MA/ Kumdil/ 10348/ XI/ 87 tentang Tata Tertib Dan Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE.002/ J.A/ 4/ 1989 tanggal 30 April 1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B 532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.

Surat Telegram Rahasia Nomor TR/ 11241 XI/ 2006 tentang Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh ABH Polri Mengedepankan Diversi.

Surat Telegram Rahasia dari KABARESKRIM POLRI No. Pol TR/ 395/ DIT.I/ VI/ 2008, tentang Kewenangan Polri Dalam Menangani ABH Dengan Keadilan Restoratif Dan diversi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-II.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. LN RI No. 32 Tahun 1979. TLN RI No. 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN RI No. 76 Tahun 1981. TLN RI No. 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakat. LN RI No. 77 Tahun 1995. TLN RI No. 3614.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. LN RI No. 3 Tahun 1997. TLN RI No. 3668.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Anak. LN RI No. 56 Tahun 1999. TLN RI No. 3835.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. LN RI No. 165 Tahun 1999. TLN RI No. 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. LN RI No. 208 Tahun 2000. TLN RI No. 4026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN RI No. 109 Tahun 2002. TLN RI No.4235.

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. LN RI No. 64 Tahun 2006. TLN RI No. 4535.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN RI No. 140 Tahun 2009. TLN RI No. 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN RI No. 143 Tahun 2009. TLN RI No. 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. LN RI No. 153 Tahun 2012. TLN RI No. 5332.

Utomo, Setyo, 2011, *Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, BPHN Kernerterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Cet. I, Universitas Trisakti, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*. Cet. I, Mandar Maju, Bandung.

Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena Dan Penanggulangannya*. Cet. II, Aswaja Presindo, Yogyakarta.

Wignjodipoero, R.S. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung. 1983.

Zulfa, EA dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Cet. I, Lubuk Agung, Bandung.

<http://www.pendekatan.keadilan.restoratif.peradilan.id.com>, 12 Mei 2014.

<http://www.Sejarah.Singkat.UNICEF.Di.Indonesia.id.com>. 15 Mei 2014.

